

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, dkk, 1984, *"Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan"*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali Zaidan M, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana, 2015*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Hidayat, 1986, *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harahap Yahya. M, 1986, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Kansil C.S.T dan Kansil S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Lawrence M. Friedman, Lawrence. 1975. *The Legal System; A Social Science Perspective*. New York : Russell Sage Foundation.
- Niniek Suparni dkk, 2013, *Hukum Progresif Oleh Lembaga Kejaksaan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1990, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soewarno Handyaningrat, 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supardi H dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258

Republik Indonesia, Undang Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1983.

Republik Indonesia, Undang Undang tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1985.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 118 tahun 2004.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Inonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4401 tahun 2004.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073 Tahun 2009.

Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015. Jakarta.

Karya Ilmiah

Sherief Maronie, Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif indonesia, diakses pada tanggal 24 September 2019 http://kkp.go.id/djpdspkp/Penegakan_Hukum_di_Wilayah_ZEEI

Anto Purwanto, 2021

PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA (ZEEI)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Titik Sunarti Dkk, 2017 “Optimalisasi Eksekusi Pidana Denda dikaitkan dengan Pasal 102 Undang Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan”, Kejaksaan Agung, Pusat Penelitian dan Pengembangan.

M. Amin Hanafi, 2018, “Penegakan hukum tindak pidana illegal fishing pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia”, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>

Sumber Lainnya

Luas Perairan Indonesia, 2018 diakses 25 September 2019 **Error! Hyperlink reference not valid.**

UN Conventions on the Laws of Treaties, Viena (23 May 1969), Article 26 yang diakses pada tanggal 25 September 2019. **Error! Hyperlink reference not valid..**